

Global Trends 2025: A Transformed World

Oleh :

Ali Dahwir

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email : dahwirali@yahoo.com

ABSTRACT

Future trends related to the development of global demographics include the increasing number of people residing in big cities caused by the high number of urbanites, as well as the increasing number of large cities especially in developing countries and also the increasing number of poverty. The political legislation of Indonesian immigration and territorial defense policy in relation to international migration has been established in Law Number. 6 Year 2011 on Immigration. Indonesian law politics in the field of immigration aims to oversee foreigners to be further enhanced in line with increasing international crime or transnational crimes, such as trafficking, human smuggling, and narcotics crimes committed by an organized international criminal syndicate

Keywords: Global Trends, A Transformed World

ABSTRAK

Trend masa depan terkait dengan perkembangan demografi global diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berada di kota-kota besar yang diakibatkan oleh tingginya angka kaum urban, serta bertambah banyaknya jumlah kota besar terutama pada negara-negara berkembang dan juga semakin tingginya angka kemiskinan. Politik hukum keimigrasian dan politik pertahanan kewilayahan Indonesia dalam kaitannya dengan migrasi internasional telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Politik hukum Indonesia dibidang keimigrasian bertujuan untuk pengawasan terhadap orang asing agar lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, penyelundupan manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.

Kata Kunci: Global Trends, A Transformed World

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memasuki milenium ketiga, yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan masyarakat dunia dan berkembangnya teknologi di bidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.

Dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan

dalam bentuk konvensi internasional. Negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi pada tahun 2000, atau *united nations convention against transnational organized crime*, 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan,

batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional.

Perubahan pada hakikatnya adalah suatu kemestian yang tidak mungkin ditampik oleh siapapun bahkan oleh alam sekalipun. Manusia mengalami, manusia memaknai dan manusia menciptakan perubahan dalam kehidupan berdasarkan kebutuhan alam dan manusia sendiri. Perubahan merupakan bagian dari entitas kemanusiaan yang melekat dalam diri manusia dengan akal pikiran yang menggerakkan perubahan tersebut. Artinya dalam proses perubahan yang berlangsung, manusia menjadi individu utama yang mana proses tersebut menyempurnakan realitas konstruksi semesta raya. Dalam proses perubahan atau dikenal dengan transformasi, manusia merupakan inti dari proses yang berlangsung.

Tren kelahiran, kematian, dan migrasi mengubah ukuran absolut dan relatif muda dan tua, pedesaan dan perkotaan, dan etnis populasi mayoritas dan minoritas dalam dan antara negara berkembang. *Reconfigurations* demografis ini akan menawarkan kesempatan sosial dan ekonomi bagi beberapa kekuatan dan pengaturannya sangat menantang didirikan pada orang lain. Populasi itu lebih dari 50 negara atau lebih dari sepertiga (beberapa lebih dari dua pertiga) pada tahun 2025, menempatkan tambahan tekanan pada sumber daya vital alam, jasa, dan infrastruktur.

Penduduk dunia diproyeksikan tumbuh sekitar 1,2 miliar antara tahun

2009 dan 2025 dari 6,8 miliar menjadi sekitar 8 miliar orang. Meskipun peningkatan populasi global substansial-dengan efek bersamaan pada sumber-tingkat pertumbuhan akan lebih lambat daripada itu, turun dari tingkat yang naik 2,4 miliar orang. Permasalahan akan semakin banyak muncul ketika populasi penduduk dunia yang semakin tinggi yang tidak diikuti dengan sumber daya manusia. Kondisi yang seperti ini akan menambah banyaknya populasi penduduk miskin, sementara masalah kemiskinan adalah masalah yang harus dituntaskan oleh setiap negara.

Penuntasan kemiskinan dapat dilakukan oleh setiap negara dengan politik pembangunannya baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Permasalahan kemiskinan akan memberikan menimbulkan rentetan permasalahan lain, seperti kejahatan yang bersifat nasional maupun transnasional, tingginya angka kematian ibu dan anak, rendahnya tingkat kesehatan, pendidikan, serta akan merambah pada migrasi untuk mencari daerah yang lebih menjanjikan secara ekonomi, baik secara legal maupun secara ilegal (migrasi gelap).

Perkembangan penduduk tanpa disertai dengan kontrol untuk mengukur jumlah penduduk yang diinginkan, hanya akan menumbuhkan masalah sosial ekonomis dengan segala pertumbuhan penduduk yang tinggi dari tahun ketahun memerlukan tambahan investasi dan sarana di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sebagainya. Hal itu tentu saja merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah dalam usahanya untuk membangun dan meningkatkan taraf hidup negaranya. Sehingga tidak dapat dipungkiri hal seperti ini akan menumbuhkembangkan jumlah rakyat miskin.

Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam proses pembangunan ekonomi. Hampir setiap Negara mengalami permasalahan kemiskinan, baik negara maju maupun negara berkembang. Kemiskinan menjadi

isu dunia yang banyak diminati oleh para peneliti karena jumlahnya yang besar dan dampak yang ditimbulkannya sangat buruk bagi kehidupan masyarakat.

World Bank (2004) melaporkan bahwa seperempat penduduk dunia dewasa ini tergolong miskin. Kemiskinan di Indonesia jika dihitung berdasarkan standar hidup minimum dengan pengeluaran per kapita per hari US\$ 2, maka penduduk yang tergolong miskin mencapai 59,99 persen (*World Bank*, 2007). Menurut Yudhoyono dan Harniati, kemiskinan mempunyai dampak menurunkan kualitas hidup, menimbulkan beban sosial ekonomi masyarakat, menurunkan kualitas sumberdaya manusia, dan menurunkan ketertiban umum.

Selaras dengan proyeksi *United National* (UN) bahwa penduduk perkotaan dinegara-negara berkembang terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 2,4 persen per tahun. Angka ini merupakan dua kali lipat angka pertumbuhan penduduk total negara-negara berkembang pada umumnya, yakni sekitar 1,2 persen. Meski penduduk perkotaan di negara-negara maju juga meningkat dengan angka pertumbuhan yang lebih besar daripada angka pertumbuhan penduduk totalnya, dan juga angka urbanisasinya jauh lebih besar daripada negara-negara berkembang, pertumbuhan perkotaan di negara-negara berkembang tetap lebih cepat disertai dengan meningkatnya penduduk perkotaan secara absolut.

Pada 30 tahun mendatang, penduduk perkotaan di negara-negara berkembang diproyeksikan meningkat dua kali lipat, dari sekitar 2 miliar di tahun 2000 menjadi sekitar 4 miliar menjelang tahun 2030. Sebaliknya penduduk perkotaan di negara-negara maju diproyeksikan hanya bertambah dari 900 juta di tahun 2000 menjadi 1 miliar di tahun 2030. Sementara itu angka urbanisasi di negara-negara maju saat ini sudah mencapai 75 persen.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduknya, jumlah kota-kota besar di negara-negara berkembang juga akan

meningkat secara substansial. Di tahun 2000 terdapat 388 kota di dunia dengan 1 juta atau lebih penduduknya. Namun menjelang tahun 2015 diperkirakan akan terdapat 554 kota, lebih dari dua per tiga di antaranya (426 kota) akan terdapat di negara-negara berkembang. *United Nations* juga memperkenalkan istilah *megacities* untuk menjelaskan kota-kota dengan jumlah penduduk 8 juta orang atau lebih. Institusi ini juga memperkenalkan ambang batas (*threshold*) untuk status *megacity* sebesar 10 juta penduduk. Saat ini, ada sekitar 17 *megacity* yang terdaftar di *United Nations*, dengan 4 diantaranya terletak di negara-negara berkembang. Menjelang 2015, menurut proyeksi yang dibuat oleh *United Nations* tersebut, diperkirakan akan terdapat 21 kota-kota yang memiliki paling sedikit 10 juta penduduk yang tinggal di kota-kota tersebut.

Jadi trend masa depan terkait dengan perkembangan demografi global diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk yang berada di kota-kota besar yang diakibatkan oleh tingginya angka kaum urban, serta bertambah banyaknya jumlah kota besar terutama pada negara-negara berkembang dan juga semakin tingginya angka kemiskinan.

B. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaiman politik hukum kependudukan Indonesia dalam kerangka demografi dalam perspektif global trends 2025

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan komparatif, pendekatan dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

II. PEMBAHASAN

Berbagai sektor pembangunan di Indonesia yang sangat rumit untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera menyebabkan pihak pemerintah perlu merancang satu cara kebudayaan yang lebih komprehensif. Strategi ini meliputi seluruh pola kehidupan masyarakat yang berhubungan langsung dengan faktor, *anthropos*, *oikhos*, *tekne* dan *ethos*.¹

Meskipun demikian perlu diingat bahwa seluruh alat pendukung kependudukan berfungsi sebagai instrumen. Ini akan berarti jika digunakan untuk kepentingan manusia sedangkan penertian manusia akan terwujud, apabila ia berhasil mentransformasikan instrumen tersebut ke dalam dirinya melalui pemahaman yang benar. Dengan demikian, berlaku suatu perubahan dalam kehidupan manusia untuk mewujudkan fenomena interaksi yang harmonis di antara lingkungan hidup dengan manusia.²

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyampaikan kalau tahun ini penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 250 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun. Angka yang cukup tinggi ini dinilai Sudibyo disebabkan oleh beberapa faktor penting. Menurut Sudibyo, situasi kependudukan Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu Kuantitas, Kualitas dan Dinamika.³

Jumlah pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 2,6 juta jiwa pertahun. Laju pertumbuhan penduduk ini terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga ketahanan pangan. Populasi tinggi yang tidak dibarengi dengan lahan pangan dan

energi yang cukup akan menyebabkan ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang berimbas pada harga pangan mahal. Karena itu, pemerintah akan melakukan berbagai program strategis untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Salah satu solusi dari peningkatan angka pertumbuhan penduduk adalah program pemerintah yaitu program Keluarga Berencana (KB). Tetapi dalam penerapannya saat ini masih belum optimal, sehingga pemerintah harus merevitalisasi kembali program Keluarga Berencana.

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan pemerintah akan mengupayakan pertumbuhan penduduk di bawah satu persen. Pada saat ini, laju pertumbuhan penduduk di Indonesia cukup tinggi yakni 1,5 persen dari total penduduk. Agung menyebutkan upaya yang akan dilakukan diantaranya adalah revitalisasi program keluarga berencana dengan program khusus. Antaralain pemerintah berencana untuk meningkatkan alokasi anggaran program keluarga berencana dengan sasaran pemberian alat kontrasepsi bagi masyarakat yang tidak mampu. Selain itu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) juga akan didirikan di daerah yang selama ini belum memilikinya.⁴

Berdasarkan konsiderans Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dijelaskan bahwa, hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan

¹ S. Poesawardjojo, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 33

² *Ibid*, hal. 34

³ Fitri Syarifah, *BKKBN: Tahun Ini Penduduk Indonesia Capai 250 Juta Jiwa*, <http://health.liputan6.com/>, diakses tanggal 18 Juni 2016,

⁴ Agung Laksono, *Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Pendudukan di Bawah Satu Persen*, <http://www.republika.co.id/>, diakses tanggal 19 Juni 2016

suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Politik hukum dalam bidang kependudukan juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Dalam konsidengannya dijelaskan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu politik pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Program keluarga berencana oleh pemerintah adalah agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang. Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia telah berumur sangat lama yaitu pada tahun 70-an dan masyarakat dunia menganggap berhasil menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Sehingga dengan program tersebut diharapkan dapat berinflikasi terhadap pembangunan nasional secara menyeluruh.

Selanjutnya jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional, oleh karena itu kuantitas penduduk dikendalikan, kualitas penduduk dan kualitas keluarga dikembangkan, serta mobilitas penduduk

diarahkan agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Indonesia dipandang cukup sukses dalam implementasi program Keluarga Berencana (KB) yang di perkenalkan sejak tahun 1968. Secara nasional tingkat pertumbuhan penduduk dapat ditekan dari 2,31 persen pada tahun 1970-an menjadi 1,49 persen tahun 2000-an. Angka pertumbuhan penduduk yang telah dicapai tersebut dipandang masih belum cukup jika dikaitkan dengan total penduduk nasional. Selain itu, pasca reformasi dan implementasi otonomi daerah, kebijakan program KB berada dalam otoritas daerah.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Sjarief menyatakan, Indonesia harus segera mengerem laju pertumbuhan penduduk. Saat ini laju pertumbuhan penduduk Indonesia memang cukup tinggi, yakni 2,6 juta jiwa per tahun. Jika ini tidak diatasi, maka 10 tahun lagi Indonesia akan mengalami ledakan penduduk, kata Sugiri. Tahun ini, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar 230,6 juta jiwa. Tanpa KB, 11 tahun lagi atau pada 2020, penduduk Indonesia akan mencapai 261 juta manusia.⁵

Dengan keberhasilan KB menekan angka laju pertumbuhan 0,5% per tahun, maka jumlah penduduk 2020 hanya naik menjadi sekitar 246 juta jiwa. Ini berarti KB bisa menekan angka kelahiran sebanyak 15 juta jiwa dalam 11 tahun, atau 1,3 juta jiwa dalam setahun. Jika penurunan laju pertumbuhan penduduk sebanyak itu bisa tercapai, berarti negara bisa menghemat triliunan rupiah untuk biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, dengan jumlah kelahiran yang terkendali, target untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, pengurangan angka kemiskinan, dan

⁵ Yohan Rubiyantoro, Amal Ihsan Hadian, *Program Keluarga Berencana: Indonesia Harus Mengerem Laju Pertumbuhan Penduduk*, <http://nasional.kontan.co.id/news>, diakses tanggal. 15 Juni 2016

peningkatan pendapatan per kapitan dapat lebih mudah direalisasikan.⁶

Pemerataan penduduk melalui transmigrasi dianggap penting, mengingat kekayaan alam yang merupakan modal pokok dalam pembangunan nasional masih terpendam dalam bumi Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Patrick Manning dalam bukunya *Migration in World History* (2005) menyatakan bahwa migrasi yang dilakukan oleh manusia—*homo sapiens*—telah terjadi sejak 40 ribu tahun sebelum Masehi. Dorongan utama dilakukannya migrasi pada masa itu secara umum berasal dari naluri alamiah umat manusia untuk mencari tempat tinggal atau daerah bermukim yang dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Sejarah mencatat, bangsa Canaan (yang sekarang disebut bangsa Palestina) pernah melakukan migrasi dari Asia menuju Eropa, demikian juga yang dilakukan oleh bangsa Romawi di masa kejayaannya dan bangsa-bangsa lainnya.⁷

Sensus Penduduk Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2010 (disingkat SP2010) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia pada tanggal 1 Mei–15 Juni 2010. Sensus ini menggunakan teknologi *Intelligent Character Recognition/ Optical Mark Reader* (ICR/OMR). Berdasarkan hasil sensus, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa, dengan rasio jumlah penduduk laki-laki tidak jauh berbeda terhadap jumlah penduduk perempuan.⁸

Dilihat dari rasio berdasarkan jenis kelamin pada piramida penduduk tahun 1961 sampai 2010, jumlah penduduk laki-laki mengalami peningkatan, sehingga pada sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada

jumlah penduduk perempuan. Tren jumlah penduduk Indonesia menunjukkan peningkatan secara berkesinambungan. Dapat dilihat sejak tahun 1930 jumlah penduduk Indonesia merangkak naik secara signifikan setiap interval 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir sejak tahun 2010, jumlah penduduk mengalami peningkatan yang paling besar yaitu sebanyak 32,5 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk sempat mengalami penurunan pada rentang waktu 1990-2000 yaitu sebesar 25,7 juta jiwa dibandingkan dengan rentang waktu sebelumnya (1980-1990) yang mencapai angka 31,9 juta jiwa.⁹

Peningkatan laju pertumbuhan kembali terjadi pada periode 2000-2010 seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk (237,6 juta jiwa) dengan laju pertumbuhan sebesar 1,49 persen. Secara absolut pertambahan penduduk Indonesia masih akan meningkat sekitar 3 sampai 4 juta jiwa per tahun. Hal ini disebabkan belum terkendalinya angka kelahiran, sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk pasangan usia subur yang relatif lebih cepat dibanding kelompok usia sebelumnya, atau timbulnya momentum kependudukan.¹⁰

Sekitar 65 % jumlah penduduk Indonesia hidup di daerah pedesaan, sisanya kurang lebih 35 % menetap di daerah perkotaan. Jumlah desa di Indonesia mencapai 62.806 desa dan jumlah kabupaten dan kota sebanyak kurang lebih 440 kota.¹¹ Daerah pedesaan sangat luas wilayahnya, sebagian besar penduduknya hidup disektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan), artinya struktur perekonomiannya sangat berat sebelah pada sektor pertanian atau daerah yang berbasis agraris (*agriculture base*). Tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat

⁶ *Ibid.*,

⁷ IOM dan UNHCR, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, 2009, hal. 24

⁸ <http://infopublik.kominfo.go.id>, diakses tanggal. 19 Juni 2016

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ <http://www.depdagri.go.id/> di akses pada tanggal. 17 Juni 2016

produktivitas pertanian, pendidikan, derajat kesehatan, ketersediaan kemudahan adalah lebih rendah dibandingkan dengan sektor perkotaan.

Akibat kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan, maka pemerintah terdorong untuk melakukan percepatan pembangunan daerah pedesaan. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan perdesaan, telah dilakukan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan perdesaan. Terdapat berbagai konsep pengembangan kawasan pedesaan menggunakan pendekatan spasial (tata ruang) antara lain yaitu:¹²

- (1) Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) beserta Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D); dan
- (2) *agropolitan distric*. Konsep pengembangan agropolitan¹³ dapat diinterpretasikan sebagai *teority-based identities*. Konsep kawasan pedesaan ini menyangkut potensi, kemandirian dan kebanggaan lokal. Beberapa negara yang telah berhasil menerapkan pemberdayaan identitas *teority* adalah Korea, Cina, dan Jepang.

¹²Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 92

¹³Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan). Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. [http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/\(di akses tanggal 19 Juni 2016\)](http://musi-rawas.go.id/musirawas/images/(di_aksess_tanggal_19_Juni_2016))

Kebijakan kependudukan diartikan sebagai langkah-langkah dan program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis, dan tujuan-tujuan umum lain dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel utama demografi, yaitu besar penduduk dan pertumbuhannya, serta perubahan dan ciri-ciri demografisnya.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas Wirosuhardjo menyatakan bahwa kebijakan kependudukan diwujudkan dalam bentuk kebijakan ekonomi dan sosial yang diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduk. Kebijakan penduduk tersebut meliputi kebijakan penyediaan lapangan kerja untuk penduduk, pemberian kesempatan pendidikan, peningkatan kesehatan serta usaha-usaha menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Selanjutnya ditambahkan pula bahwa berbagai kebijakan penduduk tersebut maksudkan untuk mempengaruhi penduduk dalam besar, komposisi, distribusi, pertumbuhan serta ciri-ciri penduduk lainnya.¹⁴

Secara teori kebijakan kependudukan dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu: kebijakan kependudukan yang mempengaruhi variabel kependudukan dan kebijakan kependudukan yang menanggapi perubahan-perubahan kependudukan. Kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan antara lain mengadakan vaksinasi anak-anak yang menyelamatkan mereka dari penyakit yang berbahaya. Vaksinasi demikian akan menurunkan kematian anak-anak dan akan mempengaruhi angka kematian penduduk secara keseluruhan. Kebijakan yang menanggapi perubahan penduduk antara lain ialah pendirian sekolah-sekolah untuk menampung peningkatan jumlah anak-

¹⁴ Kartomo Wirosuhardjo, *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 34

anak yang disebabkan oleh penurunan angka kematian anak-anak.¹⁵

Suatu kebijakan yang mempengaruhi variabel kependudukan dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Kebijakan langsung dalam hal ini antara lain ialah pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penduduk akibat penurunan banyaknya kelahiran. Kebijakan kependudukan yang bersifat tidak langsung misalnya melalui pencabutan subsidi pada keluarga yang mempunyai anak lebih dari jumlah tertentu, misalnya dua, yang akan mempengaruhi jumlah anak yang diinginkan oleh keluarga-keluarga.

Pada umumnya kebijakan kependudukan memiliki dua cakupan yaitu kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu dan kebijakan kependudukan yang bersifat sektoral. Kebijakan nasional terpadu mencakup segala segi kehidupan dengan satu tujuan mengenai kependudukan. Semua komponen yang mempunyai hubungan dengan kependudukan mempunyai orientasi yang sama sehingga merupakan satu sistem. Masing-masing komponen mempunyai kaitan dengan komponen-komponen lain yang menuju satu sasaran yang ditentukan, misalnya penurunan fertilitas, penurunan mortalitas atau peningkatan migrasi penduduk. Kebijakan sektoral menyerahkan masalah kependudukan kepada satu sektor. Kegiatan sektoral dapat dikoordinasikan tetapi dalam kenyataan koordinasi sukar dilaksanakan.¹⁶

Masalah kependudukan menjadi sangat penting karena menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia secara individu maupun kelompok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih-lebih hal tersebut dikaitkan dengan

upaya suatu negara dalam mencapai kesejahteraan bagi warga negaranya.

Dalam pemahaman hukum dan kependudukan, maka konsep-konsep dasar kependudukan sebagai peralatan demografi yaitu dalam bidang fertilisasi, mortalitas dan migrasi dan konsep yang berhubungan dengan kependudukan seperti angkatan kerja, pendidikan dan perubahan kependudukan perlu diperhitungkan secara cermat dalam perumusan ketentuan-ketentuan hukum. Hukum dan kependudukan sebagai salah satu studi melakukan kajian kependudukan dan hukum sebagai variabel-variabel yang berpengaruh secara timbal balik, atau kajian hukum kependudukan, dengan memasukkan dimensi sosialnya.

Kajian mengenai Hukum dan Kependudukan adalah merupakan kajian yang mempunyai kaitan atau dimensi, yaitu kependudukan mengkaji masalah kependudukan dari segi hukum dan mengaitkannya pada dimensi sosialnya. Hal ini karena kenyataan bahwa cara kajian masalah kependudukan dewasa ini lebih menitikberatkan pada usaha bagaimana mengoperasikan hukum dalam usaha mengatasi masalah kependudukan. Dengan kata lain bagaimana menggarap hukum dan lembaga-lembaganya untuk menjaga agar kenaikan jumlah penduduk dapat dikendalikan, sedangkan mengenai pengaruh ciri-ciri dan perilaku serta kualitas penduduk terhadap hukum kurang mendapat perhatian. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan nasional dalam rangka mengatasi permasalahan kependudukan tersebut.

Dalam penjelasan umum UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, diuraikan bahwa, sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁵ Abdul Wahab Solichin, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 1993, hal. 24

¹⁶ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Cetakan 7 (Revisi), LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 64

Undang Dasar 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan berkeseimbangan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut, perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Mengingat jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal pelaksanaan pembangunan dan potensi bagi peningkatan pembangunan di segala bidang. Namun jumlah penduduk yang besar apabila tidak diupayakan pengembangan kualitasnya dapat merupakan beban bagi pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat. Karena itu untuk mengendalikan dan sekaligus memanfaatkan jumlah penduduk yang besar, diperlukan upaya pengaturan pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga yang pelaksanaannya diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu antar sektor Pemerintah, dan antara Pemerintah dengan masyarakat.

Kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diarahkan kepada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat secara lebih terpadu. Kebijakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera diselenggarakan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan

antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Upaya pembangunan keluarga sejahtera, termasuk keluarga berencana, bukan hanya semata-mata untuk pengaturan kelahiran, tetapi juga untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Upaya pengaturan kelahiran menuju pada keluarga kecil, sehat, bahagia, dan sejahtera yang telah dilaksanakan melalui pengembangan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, memberikan landasan bagi terpenuhinya kaidah tentang jumlah anggota keluarga yang ideal, yang memungkinkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta masyarakat.

Kebijakan lain dalam hal kependudukan adalah Program Transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam rangka pembentukan masyarakat baru untuk membantu pembangunan daerah, baik daerah yang ditinggalkan, maupun daerah yang didatangi dalam rangka pembangunan Nasional.¹⁷ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor. 2 Tahun 1999 Tentang, Pelaksanaan Transmigrasi, transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

Penyelenggaraan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, untuk peningkatan dan pemerataan pembangunan antar daerah dan wilayah dengan mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru atau mendukung percepatan pusat pertumbuhan wilayah yang telah ada atau yang sedang berkembang. Disamping itu penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas penduduk

¹⁷ Andrews, C.M. dan Raharjo, *Pemukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hal. 72

melalui penataan dan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta sebagai wahana integrasi dan akulturasi budaya nasional.

Penyelenggaraan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar dengan menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha serta mendorong perluasan dan pengembangan investasi. Penyelenggaraan Transmigrasi merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari tujuan, arah dan ruang lingkup dari pembangunan nasional.

Kegiatan penyelenggaraan transmigrasi yang menyebar di seluruh wilayah nusantara merupakan bagian dari pembangunan daerah, utamanya dalam bidang *agro*-industri dan *agro*-bisnis dengan mewujudkan desa-desa pertanian sebagai pusat pertumbuhan wilayah baru. Selain itu, untuk mendukung percepatan pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Masing-masing pusat pertumbuhan dilengkapi dengan prasarana dan sarana permukiman, saling berhubungan dalam tatanan jaringan jalan, sehingga akan membentuk beberapa Satuan Kawasan Pengembangan yang menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dengan terciptanya kesempatan kerja dan peluang usaha, baik usaha primer, sekunder maupun tersier dengan pola usaha yang sesuai akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar, yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan harkat, martabat dan kualitas hidup bangsa Indonesia, dalam rangka mengikuti proses globalisasi yang akan terus berkembang, dengan harapan terciptanya pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan nasional, meliputi berbagai aspek kehidupan. Maksud dan tujuannya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek

yang menjadi prioritas pembangunan saat ini, yakni pembangunan yang berkaitan dengan kependudukan atau demografi, baik dalam menata laju pertumbuhan maupun peningkatan kualitas penduduk, serta upaya penyediaan sarana dan prasarananya. Dengan jumlah penduduk yang besar tetapi tidak seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya, dapat mempengaruhi terhadap berbagai aspek pembangunan dalam kehidupan masyarakat. Namun dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas, merupakan salah satu fondasi yang kokoh, serta dapat menunjukkan keberhasilan pembangunan.

Peningkatan Sumber Daya manusia Indonesia merupakan salah satu politik hukum yang harus diformulasikan oleh pemerintah Indonesia. Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Globalisasi yang sudah pasti dihadapi oleh bangsa Indonesia menuntut adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha. Dalam globalisasi yang menyangkut hubungan intraregional dan internasional akan terjadi persaingan antar negara.

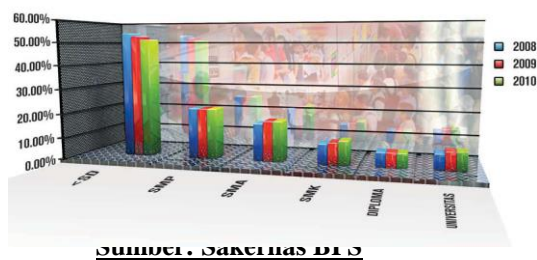
Secara struktural angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk kedalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2008 jumlah angkatan kerja sebanyak 113,74 juta meningkat menjadi 116,00 juta pada tahun 2009 dan menjadi 119,40 juta pada tahun 2010.

Indonesia dalam kancas persaingan global menurut *World Competitiveness Report* menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh negara yang diteliti, di bawah Singapura (8), Malaysia (34),

Cina (35), Filipina (38), dan Thailand (40). Pencapaian tujuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan cenderung akan semakin ditentukan oleh penguasaan teknologi dan informasi, walaupun kualitas sumber daya manusia (SDM) masih tetap yang utama.

Terkait dengan kondisi sumber daya manusia Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar. Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi.

Proposisi Angkatan Kerja Berdasarkan Pendidikan



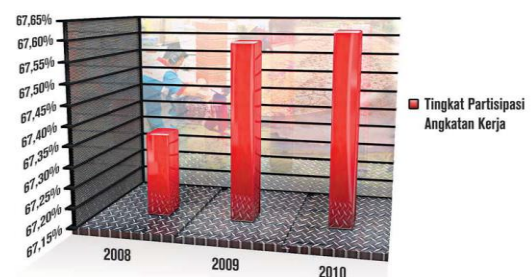
Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Namun peningkatan tenaga kerja tersebut diikuti juga dengan peningkatan tenaga kerja lulusan sekolah dasar.

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7%, hanya berasal dari pemanfaatan sumberdaya alam intensif (hutan, dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi

langsung. Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM.

Namun demikian Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia pada tahun 2008, 2009 dan 2010 secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2008 tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 67,33 persen dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 67,60 persen. Tren peningkatan ini terus berlanjut pada tahun 2010 yang mencapai 67,63 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (2008-2010)



Meningkatnya TPAK tersebut salah satunya disebabkan oleh kesempatan kerja yang semakin meluas dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Hal tersebut tampaknya memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap meningkatnya laju partisipasi angkatan kerja. Selain itu, peningkatan TPAK ini juga dipengaruhi oleh peningkatan TPAK perempuan. Akan tetapi tingkatan SDMnya masih sangat rendah.

Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan

pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan.¹⁸ Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di segala bidang termasuk dunia pendidikan. Pembangunan nasional dibidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat maju, adil dan makmur.¹⁹ Selanjutnya dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Nachrowi dan Suhandoyo menyatakan dalam pengembangan suatu wilayah sebagai strategi pembangunan nasional ada tiga pilar yang mempunyai hubungan yang erat dan harus saling berinteraksi yaitu: sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi. Suatu wilayah yang mempunyai sumberdaya alam yang cukup kaya dan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan teknologi akan cepat berkembang dibanding wilayah lain.²⁰

¹⁸ Baharudin Taufik, *Brainware Management: Generasi Kelima Manusia (cetakan keempat)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal. 12

¹⁹ Matondang, Z. *Mengoptimalkan Mutu Proses Pembelajaran Matematika di Kelas*. Jurnal EducanduM. Jurnal Manajemen Pendidikan. PPs Unimed -ISMPI Sumatera Utara. Volume III No, 02 Edisi Desember 2010

²⁰ Nachrowi dan Suhandoyo, *Analisis Sumber Daya Manusia, Otonomi Daerah, dan Pengembangan Wilayah Dalam Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. Jakarta. 2010

Agar pendidikan tersebut berkualitas dan berdampak bagi suatu pengembangan wilayah maka perlu dilakukan perencanaan pendidikan yang melibatkan kegiatan multidisipliner yang memperhatikan masalah-masalah demografi, ekonomi, keuangan, pemerintah, pedagogi, statistik persekolahan, lingkungan, sosial budaya dan aspek lainnya yang secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi perencanaan pendidikan.

Pendidikan merupakan faktor yang secara signifikan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu pembangunan pendidikan memerlukan perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan indikator-indikator ekonomi, kependudukan, kependidikan maupun potensi sumber daya alam. Sejalan dengan hal itu, strategi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia diarahkan pada kemampuan kecakapan/keterampilan hidup (*life skill*) para peserta didik. Pendidikan kecakapan hidup ini sangat relevan dengan pengembangan pendidikan kejuruan.

Meningkatkan SDM d melalui IPTEK. Dengan adanya IPTEK maka akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa meningkatkan SDM Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas.²¹ Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia. Dalam aspek ekonomi dengan adanya IPTEK, maka SDM Indonesia akan semakin meningkat dengan pengetahuan-pengetahuan dari teknologi tersebut. Dengan kemajuan SDM ini, tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia.

Salah satu problem struktural yang dihadapi dalam dunia pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan subordinasi

²¹ Sofian Effendi, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*, UGM Jogjakarta, 2003, hal.3

dari pembangunan ekonomi. Pada era sebelum reformasi pembangunan dengan pendekatan fisik begitu dominan. Hal ini sejalan dengan kuatnya orientasi pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia di masa depan melalui jalur pendidikan luar sekolah harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Botkin kegiatan belajar yang paling cocok dimasa depan adalah pembelajaran inovatif (*innovative learning*) yang memadukan belajar mengantisipasi (*antisipative learning*) dan partisipasi learning atau belajar bersama orang lain.²²

Belajar inovatif menekankan pada kesiapan untuk bertindak dalam situasi baru dan eksplorasi terhadap apa yang mungkin terjadi. Partisipasi (*participation*), antisipasi berkaitan dengan waktu sedangkan partisipasi berkaitan dengan solidaritas dalam ruang, artinya antisipasi bersifat temporal sedangkan partisipasi sifatnya geografis dan parsial. Antisipasi aktivitas mental sedangkan partisipasi bersifat social atau kemasyarakatan. Partisipasi merupakan proses aktif yang memerlukan usaha dan kerja. Partisipasi efektif akan memperluas pengertian, kapasitas untuk mengenali secara sadar, mengenali konteks dalam seketika, membandingkan acuan dan menghadapi nilai konflik dengan menunjukkan pengetahuan dan tindakan yang berkaitan dengan terjadinya partisipasiaktif.

Otonomi (*Autonomy*), konsep otonomi kebanyakn dikaitkan dengan individu, tetapi dapat juga digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri sendiri, percaya diri bebas dari ketergantungan. Otonomi dalam terminology pendidikan diperoleh dari keputusan kritis, sedangkan otonomi bagi masyarakat merupakan identitas cultural, dan bagi individu

otonomi merupakan kunci untuk pemenuhan kabutuhan diri sendiri.

Integrasi (*Integration*), berarti meningkatnya kapasitas untuk masuk dalam hubungan kemanusiaan yang lebih luas, bekerjasama, membuat hubungan dengan orang lain, mengetahui system yang lebih luas dan melihat keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian. Artinya integrasi melihat sesuatu dari keseluruhan dan kemampuan untuk mengetahui lintas hubunganan pertalian diantara masalah-masalah yang dilandasi adanya *persepsi holistic* yang memungkinkan tumbuhnya pemikiran integrative (*integrative thinking*).

Pengembangan pendidikan non formal dimasa yang akan datang perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:²³ *Pertama*, Pendidikan *non formal* perlu lebih proaktif dalam mereformasi visi, misi dan strateginya untuk mengubah program-program pendidikan yang sedianya berorientasi pada menghasilkan lulusan sebagai pencari kerja (*worker society*) menjadi upaya menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk mandiri dan pencipta lapangan kerja (*employee society*).

Kedua, unsure-unsur system pendidikan *non formal* perlu dilakukan secara lengkap dan utuh yaitu mencakup komponen, proses dan tujuan. Sistem ini harus diterapkan dalam setiap satuan, jenis, dan program pendidikan non formal. Komponen ini terdiri atas masukan lingkungan, masukan sarana, masukan mentah dan masukan lain. Proses tersebut didasarkan atas kebutuha belajar, berorientasi pada ujian, berpusat pada peserta didik dan berangkat dari pengalaman peserta didik, dalam proses ini perlu digunakan pendekatan kontinum antara *pedagogi*, *andragogi* dan atau *gerogogi*.²⁴

Selain dari pemerintah dan dunia pendidikan pihak swasta juga berperan

²² Nana Sujana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, hal. 391

²³ *Ibid*, hal. 399-404

²⁴ *Ibid*.,

dalam meningkatkan SDM Indonesia. Perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia telah mengalokasikan sebagian dananya untuk dunia pendidikan. Biasanya dana tersebut diberikan kepada masyarakat dalam bentuk beasiswa dan bantuan. Untuk merealisasikan program beasiswa tersebut tentunya perlu kerjasama antara pemerintah dan dunia pendidikan, baik itu pendidikan dasar, menengah, atas, maupun perguruan tinggi. Selain dalam bentuk beasiswa pihak swasta biasanya ada juga yang memberikan pinjaman modal usaha. Sebagai contoh program wirausaha mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat pinjaman modal dari pihak swasta, bahkan modal tersebut ada juga yang diberikan berupa hibah.²⁵

Pemerintah tidak mungkin bisa meningkatkan SDM tanpa melalui pendidikan, pihak swastapun juga demikian. Selain itu tanpa adanya partisipasi dari warga negara peningkatan SDM pun sulit dilakukan, karena apabila pemerintah mempunyai program tetapi warga negaranya tidak mau melaksanakannya maka sama saja tidak akan bisa merubah kualitas SDM Indonesia. Jadi dengan demikian kerjasama antara pemerintah, dunia pendidikan, pihak swasta dan warga negara sangat penting untuk meningkatkan SDM bangsa Indonesia.

Dari pemaparan diatas kita dapat merekonstruksi kembali tentang hakekat SDM yang berkualitas untuk membangun bangsa ini. SDM yang berkualitas dapat terbentuk melalui proses pendidikan baik pendidikan persekolahan maupun pendidikan luar sekolah. Hakikat pembangunan adalah adanya perubahan menuju kearah yang lebih baik dengan direncanakan dan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Ada beberapa karakter khas yang harus dimiliki oleh SDM yang berkualitas.

Jepang sebagai negara maju memiliki lima karakteristik kunci yang dipandang sebagai akar kekuatan bangsanya yaitu:²⁶

- 1) Emulasi, yaitu hasrat dan upaya untuk menyamai atau melebihi kemajuan orang lain;
- 2) konsensus yaitu kebiasaan masyarakat Jepang untuk berkompromi bukan konfrontasi;
- 3) Futurism, yaitu pandangan jauh ke depan, menatap kemajuan bagi perorangan dan kemajuan bersamadimasa depan;
- 4) Kualitas, dalam arti mutu menjadi faktor penarik bagi setiap proses dan hasil produksi Jepang;
- 5) Kompetisi, yang berarti bahwa sumber daya manusia dan produk bangsa Jepang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam tata kehidupan dan tata ekonomi global.

Politik hukum kependudukan Indonesia dalam kerangka demografi dalam perspektif global trends yang lain adalah kebijakan administrasi kependudukan. Kebijakan ini merupakan kebijakan kependudukan yang bersifat nasional terpadu yang melibatkan seluruh komponen yang terkait yang dikoordinasi oleh Departemen Dalam Negeri sebagai *leading sector*-nya. Dengan demikian kebijakan departemen inilah yang merepresentasikan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia, sedangkan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan di Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan instansi yang di bawah kewenangan pengaturan Departemen Dalam Negeri.

Politik pemerintah dalam bidang kependudukan selanjutnya adalah politik administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang

²⁵ Suwarsono & Alvin Y So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, L3S, Jakarta, 1994, hal. 143

²⁶ H.A.R. Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Grasindo, Jakarta, 1997, hal. 34

Administrasi Kependudukan yang berlaku sejak 29 Desember 2006. Setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut tanggal 28 Juni 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan dikeluarkannya petunjuk teknis dalam waktu enam bulan setelah dikeluarkannya Peraturan ini.

III. KESIMPULAN

Politik hukum kependudukan Indonesia dalam kerangka demografi dalam perspektif global trends 2025 diantaranya adalah:

- a. Politik hukum dalam bidang kependudukan dalam bentuk Keluarga Berencana (KB);
- b. Dibentuknya UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- c. Meningkatkan penyebaran penduduk melalui Program Transmigrasi; dan
- d. Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia; dan
- e. Politik hukum dalam bidang administrasi kependudukan.

Beberapa strategi Indonesia untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam global trends 2025 dari segi sumber daya manusia adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pengembangan Pusat Unggulan Iptek dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia;
- b. Peningkatan potensi wilayah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di dalam koridor ekonomi; dan
- c. Memperkuat konektivitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab S, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, 1993
Adisasmita Rahardjo, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006

Agung Laksono, *Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Pendudukan di Bawah Satu Persen*, <http://republika.co.id/>,
Andrews, C.M. dan Raharjo, *Pemukiman di Asia Tenggara Transmigrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983
Baharudin Taufik, *Brainware Management: Generasi Kelima Manusia (cetakan keempat)*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003
Dadang Rachmat, *Biduk Kebangsaan di Tengah Arus Globalisasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Fitri Syarifah, *BKKBN: Tahun Ini Penduduk Indonesia Capai 250 Juta Jiwa*, <http://health.liputan6.com/read>
Hanson, Gordon H., *The Economic Logic of Illegal Migration*, Council Special Reports (CSR) USA: Council on Foreign Relations, 2007
H.A.R. Tilaar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Grasindo, Jakarta, 1997
Heckmann, Friedrich, *Illegal Migration: What Can We Know and What Can We Explain? The Case of Germany*, International Migration Review, Vol. 38, No. 3, Conceptual and Methodological Developments in the Study of International Migration, 2004
IOM dan UNHCR, *Buku Petunjuk Bagi Petugas Dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*, Jakarta, 2009
Kartomo Wirosuhardjo, *Dasar-Dasar Demografi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1981
Martin, Philip & Mark Miller, *Smuggling and Trafficking: A Conference Report*. International Migration Review, Vol. 34, No. 3 (Autumn, 2000), 2000
Matondang, Z. *Mengoptimalkan Mutu Proses Pembelajaran Matematika di Kelas*. Jurnal EducanduM. Jurnal Manajemen Pendidikan. PPs Unimed -ISMPI Sumatera Utara. Volume III No, 02 Edisi Desember 2010
Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1976
Nachrowi dan Suhandoyo, *Analisis Sumber Daya Manusia, Otonomi Daerah, dan Pengembangan Wilayah Dalam Tiga*

- Pilar Pengembangan Wilayah: Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT. Jakarta. 2010
- Nana Sujana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010
- Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan, Cetakan 7 (Revisi)*, LP3ES, Jakarta, 1995
- Sitompul, D.T.H, *Kewarganegaraan*, Bahan Perkuliahan Pada Akademi Imigrasi, Jakarta, 2003
- Soepratwiro K, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Sofian Effendi, *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*, UGM Jogjakarta, 2003
- S. Poesawardjojo, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1993
- Suwarsono & Alvin Y So, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, L3S, Jakarta, 1994
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustak, Jakarta, 1982
- Yohan Rubiyantoro, *Program Keluarga Berencana: Indonesia Harus Mengerem Laju Pertumbuhan Penduduk*, <http://nasional.kontan.co.id/news>,